LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 03/PRT/M/2016
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA JASA
KONSTRUKSI BADAN USAHA PENANAMAN MODAL ASING

A. FORMAT PERMOHONAN REKOMENDASI TEKNIS

KOP	BADAN	USAHA	JASA	KONS'	TRUKSI	PMA
-----	-------	-------	------	-------	--------	-----

Nomor	:
Lampiran	:

Kepada Yth

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

c.q. Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jl. Pattimura 20 Jakarta Selatan

di. JAKARTA

Perihal : Permohonan Rekomendasi Teknis Perpanjangan IUJK

Dengan hormat disampaikan permohonan Rekomendasi Teknis perpanjangan IUJK :

Nama Perusahaan
NPWP
Alamat Kantor
Telepon/Fax
Nama Penanggung Jawab Badan Usaha : (PJBU)
Nama Penanggung Jawab Teknik (PJT)
Klasifikasi/Kualifikasi Bidang Usaha

Demikian permohonan rekomendasi teknis ini kami ajukan, untuk segera dilakukan pemantauan dan evaluasi. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Jakarta,,20
Direktur PT
Ttd
(Nama jelas)

B. FORMAT REKOMENDASI TEKNIS IUJK PMA

KOP DIREKTORAT BINA KONSTRUKSI

Nomor : Lampiran :

Kepada Yth Kepala BKPM di. Jakarta

Perihal: Rekomendasi Teknis Atas Permohonan Perpanjangan IUJK a.n (Nama BUJK PMA)

Dengan hormat disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- 1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor/PRT/M/2015 disebutkan bahwa :
 - a. Hasil Pemantauan dan Evaluasi berupa Rekomendasi Teknis diperlukan untuk perpanjangan IUJK BUJKA PMA;
 - Hasil pemantauan dan evaluasi terhadap BUJK PMA dimaksud untuk memastikan terpenuhinya semua kewajiban yang tertera dalam pasal 15 ayat 3;
- 2. Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimna dimaksud angka 1 tersebut diatas Tim Teknis telah melakukan pemantauan dan evaluasi kepada BUJKA PMA PT......pada tanggalpada proyekyang berlokasi didengan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai berikut :
 - a. BUJKA PMA PT..... yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor ...PRT/M/2015 (laporan hasil pemantauan dan evaluasi terlampir);
 - b. memberikan Rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing (BUJKA PMA) (Nama BUJKA PMA) untuk melakukan perpanjangan

Jakarta,	20
Jakarla,	,∠∪

a.n Direktur Jenderal Bina Konstruksi Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi

Tanda tangan

(nama pejabat)

C. LAPORAN KEGIATAN USAHA SEMESTER

	Format Daftar Isian Laporan Kegiatan per Semester DATA UMUM		
1.	Nama Badan usaha	:	
2.	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	
3.	Alamat Kantor	:	
5.	Nama Direktur	:	

Data Kegiatan Konstruksi

Data Kegiatan Konstruksi				
	I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI			
	(pilih salah satu)			
1.1	Nama Proyek	:		
1.2	Lokasi	:		
1.3	Pengguna Jasa	:		
1.4	Nilai Kontrak (dalam rupiah)	:		
1.5	Tipe Kontrak	:		
1.6	Tanggal Mulai Proyek			
	Tanggal Rencana Sesuai Kontrak	:		
	Tanggal Realisasi	:		
1.7	Tanggal Selesai Proyek			
	Rencana Sesuai Kontrak	:		
	Realisasi	:		
II. DA	ATA KETENAGAKERJAAN			
II.1	Nama Manajer Proyek	:		
	(lampirkan CV Manajer Proyek)			
	(bila bukan WNI, lampirkan izin			
	ketenagakerjaan WNA)			
II.2	Jabatan Kerja Dalam Proyek	: 1		
	yang diduduki oleh WNA	2		
	(lampirkan struktur organisasi	3		
	proyek)			
II.3	Jumlah Tenaga Kerja Proyek	orang		
	WNA			
II.4	Jumlah Tenaga Kerja Proyek	orang		
	WNI			
II.5 1	enaga Ahli WNI Sebagai Pendampi	ng WNA		
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai	:		
	Pendamping WNA ke-1			
	(lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)			
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:		
	Nama WNA yang didampingi	:		
	oleh Tenaga Ahli WNI			
	(lampirkan cv)			
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai	:		
	Pendamping WNA ke-2			
	(lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)			
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			

	T-1-4 TZ /N A1-1: TYPATI	Τ.
-	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:
	Nama WNA yang didampingi	:
	oleh Tenaga Ahli WNI	
	(lampirkan cv)	
III.	DATA BUJK PMA	
III.1	Akta Pendirian dan	:NomortanggalNotaris
	Perubahannya	
III.2	Nama Perusahaan	:
III.3	Bidang Usaha	:
III.4	NPWP Badan Usaha	:
III.5	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
III.6	Nomor Izin Usaha Jasa	:
	Konstruksi	
III.7	Subklasifikasi dan subkualifikasi	Badan Usaha
	Subklasifikasi	Subkualifikasi
	Subklasifikasi	
	Subklasifikasi	
	Subklasifikasi	
III.8	Lingkup Pekerjaan	<u> </u>
	Pekerjaan yang diilakukan	: 1
	BADAN USAHA	2
III.9	Kemampuan Keuangan (Kemam	
111.9	KD KEMAMPUAN KEUANGAN (KEMAM	Rp
III.10		1
111.10	Peralatan BADAN USAHA	
	Peralalah BADAN USAHA	1
		2
		3
III.11		
	Material Import yang digunakan	1
		2
	Material Lokal yang digunakan	1
		2
IV.	DATA SUB PENYEDIA JASA	
10.	SUB PENYEDIA JASA 1	
	Nama Badan Usaha	:
-	NPWP Badan Usaha	:
	Nomor Registrasi Badan Usaha	:
	(SBU)	•
	Nomor Izin Usaha Jasa	:
	Konstruksi	-
	Lingkup Pekerjaan	:
	Nilai Subkontrak	:
	Subklasifikasi Dan Subkualifikasi	1 -
	Subklasifikasi Subklasifikasi	Subkualifikasi
-		Subkuannkasi
	Subklasifikasi	
	Subklasifikasi	
	Subklasifikasi	<u> </u>
	SUB PENYEDIA JASA 2 (dan seter	
	Nama Badan Usaha	:
	NPWP Badan Usaha	:
	Nomor Registrasi Badan Usaha	:
	(SBU)	
	Nomor Izin Usaha Jasa	:
	Konstruksi	
	Lingkup Pekerjaan	:

Subklasifikasi Dan Subkualifikasi Badan Usaha		
Subklasifikasi	Subkualifikasi	
Subklasifikasi		
Subklasifikasi		
Subklasifikasi		

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN SEMESTERAN

- 1. CV Manajer Proyek (*)
- 2. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA (*)
- 3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA (*)
- 4. Struktur Organisasi Proyek (*)
- 5. Laporan Keuangan badan usaha yang telah di audit akuntan publik
- 6. Rekaman SBU dan IUJK (*)
 7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh insntansi penerbit (*)
- 8. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir Yang Ditandatangani Oleh Pengguna Jasa (*)
 9. Rekaman Pembayaran yang Dilakukan Kepada Subpenyedia Jasa (*)
- 10. Rekaman SKA/SKT Dari Tenaga Kerja Proyek (*)
- 11. Daftar Material Dan Distributor Material Serta Peralatan Dan Distributor Peralatan (*)

(*) dilampirkan untuk setiap proyek

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat,

NIP. 195803311984122001

PLIKINDON

JDIH Kementerian PUPR